



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN
PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan arah reformasi birokrasi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015-2019 digunakan sebagai acuan menetapkan dan menjalankan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 2

Road Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Agustus 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2016

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 750

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



TRİYONO HARYANTO

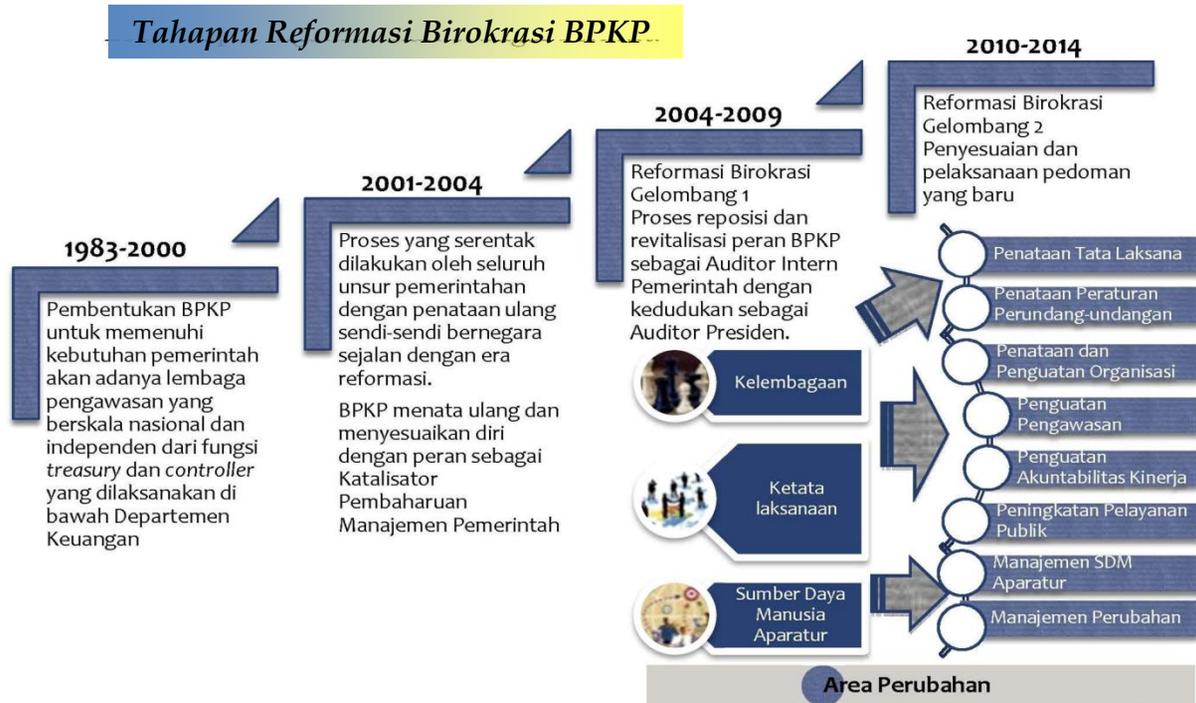
LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2019

BAB I
RINGKASAN EKSEKUTIF

Road Map Reformasi Birokrasi BPKP merupakan pedoman serta acuan rencana kerja Tim Reformasi BPKP sampai dengan tahun 2019 yang disusun berdasarkan kondisi yang ada pada tahun 2014. Pelaksanaan reformasi birokrasi mengalami transformasi. Pada awalnya, sesuai dengan PERMENPAN-RB Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, dilakukan dengan memprioritaskan pada bidang Penataan Kelembagaan (Organisasi), Penyempurnaan Bisnis Proses, dan Peningkatan Manajemen Sumber Daya Manusia.

Dengan telah ditetapkannya PERPRES Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan PERMENPAN-RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014, maka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPKP dilakukan dengan program-program yang berorientasi hasil (*outcomes oriented programs*) pada tingkatan mikro atau instansional.

Tahapan Reformasi Birokrasi di BPKP pada dasarnya telah dilaksanakan sejak pembentukan BPKP pada tahun 1983. Perkembangan dan arah pelaksanaan RB di BPKP dapat digambarkan sebagai berikut:



Berpedoman pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015, BPKP menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015–2019. *Road Map* Reformasi Birokrasi BPKP Tahun 2015-2019 ini berisikan pencapaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPKP periode 2010-2014 serta rencana kerja Reformasi Birokrasi BPKP 2015-2019 termasuk di dalamnya adalah kriteria keberhasilan, target *outcome*, rencana anggaran, kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Di samping itu, untuk mendapatkan momentum yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri instansi dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi, BPKP telah menetapkan *quick wins*. *Quick win* sendiri diartikan sebagai langkah inisiatif yang relatif dapat segera dilaksanakan dan targetnya cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam Reformasi Birokrasi.

Bercermin dari hasil evaluasi mandiri atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPKP Tahun 2010-2014, memberikan catatan terkait rencana kerja Reformasi Birokrasi yang harus dijalankan di tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
2. Melanjutkan reorganisasi 20 (dua puluh) Perwakilan BPKP sampai dengan September 2016.
3. Perumusan kebijakan hubungan jabatan struktural dan fungsional.
4. Perumusan pola karir dan mutasi.
5. Komposisi dan distribusi yang ideal dengan penataan ulang penempatan pegawai.

6. Optimalisasi SDM dukungan sebagai upaya untuk menanggulangi kekurangan fungsional umum dan fungsional tertentu.
7. Penambahan formasi SDM di fungsi utama (auditor) untuk mendukung peran dan fungsi BPKP.

Catatan tersebut telah menjadi perhatian dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 BPKP.

Memperhatikan hal di atas, maka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPKP dilakukan dengan program-program yang berorientasi hasil (*outcomes oriented programs*) pada tingkatan instansional. Area perubahan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat instansional adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan;
2. Penguatan Sistem Pengawasan;
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
4. Penguatan Kelembagaan;
5. Penguatan Tatalaksana;
6. Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
7. Penguatan Peraturan Perundang-undangan; dan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pelaksanaan dan keberhasilan Reformasi Birokrasi di BPKP sangat tergantung dari peran dan komitmen pimpinan pada seluruh tingkatan organisasi BPKP. Karena itu, keterlibatan langsung pimpinan dalam merancang perubahan birokrasi menjadi lebih baik sangat menentukan keberhasilan Reformasi Birokrasi di instansi.

Oleh karena itu, *Road Map* ini telah disusun dengan melibatkan jajaran pimpinan dan unit kerja terkait, sehingga diharapkan memberikan arah bagi upaya Reformasi Birokrasi di BPKP dan secara bertahap sampai dengan tahun 2019 mampu mencapai peningkatan kinerja sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.

BAB II PENDAHULUAN

A. Umum

Sejak dicanangkan pada tahun 2004, pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah mengalami banyak perkembangan. Tujuan awal Reformasi Birokrasi adalah perubahan pola pikir (*mind set*), budaya kerja (*culture set*), dan perilaku (*behavior*). Berkembang pada periode tahun 2010-2014 Reformasi Birokrasi ditujukan pada pencapaian tiga sasaran, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Namun demikian, pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode 2010-2014



tersebut masih menyisakan berbagai tantangan ke depan yang secara bertahap dan terus menerus harus diperbaiki. Oleh karena itu, pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode 2015-2019 ditujukan untuk mencapai tiga sasaran yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Sasaran tersebut selanjutnya diukur tingkat keberhasilannya dengan indikator

diantaranya adalah opini WTP atas laporan keuangan, tingkat kapabilitas APIP, tingkat kematangan (maturitas) implementasi SPIP, dan skor atas SAKIP. Pencapaian sasaran tersebut memerlukan peran BPKP, karena indikator sasaran yang ditetapkan sangat erat kaitannya dengan tugas-tugas BPKP.

Sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Amanat ini menjadi tantangan sekaligus tugas besar BPKP. Upaya untuk menjalankan amanat ini tentu saja harus berjalan seiring dengan upaya BPKP dalam mereformasi diri, sehingga BPKP mampu menjalankan perannya sebagai internal auditor pemerintah yang mendukung dan mengawal program-program pemerintah.

Sejalan dengan dinamika yang terus berkembang, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPKP pun mengalami perubahan. Ditetapkannya *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015, mengharuskan penyesuaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPKP.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015, pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi dalam dua tingkatan, yaitu tingkat nasional dan tingkat instansional.

Pada tingkat nasional, Reformasi Birokrasi dibagi ke dalam dua tingkat pelaksanaan, yaitu makro dan meso. Tingkat pelaksanaan makro mencakup perumusan atau penyempurnaan kebijakan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional dan diimplementasikan di masing-masing instansi pemerintah. Pada tingkat pelaksanaan meso mencakup manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi, yang mendorong perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro dalam implementasinya, dan mengkoordinasikan (mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Kementerian/Lembaga dan Pemda.

Pada tingkat instansional atau disebut dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional dan menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemda.

Memerhatikan hal di atas, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPKP dilakukan dengan program-program yang berorientasi hasil (*outcomes oriented programs*) pada tingkatan instansional. Pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing Kementerian/Lembaga satu sama lain dapat berbeda, disesuaikan dengan karakteristik masing-masing instansi dan kemajuan yang telah diperoleh selama masa pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode sebelumnya. Karena itu, setiap instansi pemerintah dapat menetapkan prioritas-prioritas program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhannya, atau bahkan membuat inovasi-inovasi yang dipandang dapat mempercepat terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansinya.

Namun demikian, Rencana Aksi dalam *Road Map* yang disusun tetap didasarkan pada lingkup program-program Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Manajemen Perubahan;
2. Penguatan Sistem Pengawasan;
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
4. Penguatan Kelembagaan;
5. Penguatan Tatalaksana;
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara;
7. Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
9. *Quick wins*.

Selain itu, Rencana Aksi yang disusun juga harus selaras dengan program-program Reformasi Birokrasi pada level makro.

Road Map Reformasi Birokrasi BPKP Tahun 2015-2019 ini berisikan pencapaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPKP, rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi BPKP, kriteria keberhasilan, target *outcome*, rencana anggaran, serta kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Melalui *Road Map* ini, diharapkan BPKP dapat melaksanakan Reformasi Birokrasi dan secara bertahap sampai dengan tahun 2019 mampu mencapai peningkatan kinerja sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah digariskan.

B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tingkat Mikro

Setiap instansi pemerintah diberikan kebebasan untuk mengembangkan model pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal ini agar setiap instansi pemerintah dapat mengembangkan pola yang lebih sesuai dengan karakteristik masing-masing dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan langkah-langkah umum dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat mikro tersebut mengikuti langkah-langkah umum, sebagai berikut:



C. Sasaran Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi menuju terwujudnya birokrasi berkinerja tinggi diharapkan akan tercapai di akhir tahun kelima, sehingga melalui Reformasi Birokrasi pemerintah sudah beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja.

Pemerintahan berbasis kinerja ditandai dengan beberapa hal, antara lain:

1. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis;
2. Kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan *outcomes* (hasil);
3. Seluruh instansi pemerintah menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja; dan
4. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja di unit kerjanya hingga pada organisasi secara keseluruhan.

BAB III ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

A. Pencapaian Reformasi Birokrasi BPKP

BPKP secara mandiri telah melakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014. Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPKP dapat terlihat dari hasil penilaian mandiri yang mencapai skor 78,74. Penilaian ini meliputi unsur proses sebesar 60% dan unsur hasil sebesar 40%. Kegiatan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh BPKP sampai dengan tahun 2014 pada setiap program secara ringkas dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Program Penataan Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)

Program Penataan Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan) dilakukan dengan tujuan untuk melakukan perubahan secara sistematis dan konsisten terhadap sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya agar menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.

Dalam pelaksanaannya di BPKP, instrumen penataan pola pikir dan budaya kerja yang diterapkan secara nasional sebagaimana diatur dalam Permenpan Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara dirasakan belum cukup efektif oleh BPKP. Oleh karena itu, BPKP mengembangkan budaya kerja yang bertumpu pada aspek profesionalisme guna mendorong perilaku yang dapat menumbuhkembangkan dan memelihara citra baik BPKP.

BPKP telah melakukan kaji ulang terhadap nilai-nilai budaya kerja dari PRIMA menjadi PIONIR yaitu Profesional, Independen, Orientasi pada Pengguna, Nurani dan Akal Sehat, Integritas, serta Responsibel. Percepatan perubahan people paradigm SDM BPKP dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan dan *workshop mindshifting* di seluruh unit-unit kerja, Forum Budaya Kerja, Forum Kepegawaian dan JFA, rakor teknis substantif, serta seminar motivasi dan *leadership*.

2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan sasaran/target untuk menurunkannya tumpang tindih, disharmonisasi,

dan multitafsir peraturan perundang-undangan serta meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh BPKP.

Tujuan dalam Penataan Peraturan Perundang-undangan adalah menciptakan peraturan perundang-undangan yang harmonis, tidak tumpang tindih, dan tidak multitafsir, serta pengelolaannya yang tertib dan informatif. Untuk mencapai hal tersebut, perlu dilakukan *legislative drafting* terhadap rancangan peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, serta penyampaian informasi berupa peraturan perundang-undangan yang telah terbit kepada pihak intern dan ekstern.

3. Program Penataan dan Penguatan Organisasi

Program Penataan dan Penguatan Organisasi dilakukan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi BPKP secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi BPKP menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*).

Dalam bidang penataan dan penguatan organisasi, beberapa hal-hal yang telah dilaksanakan oleh BPKP antara lain redefinisi peran, visi, dan misi BPKP, adanya tambahan 8 kantor Perwakilan baru terkait dengan tuntutan akan pelaksanaan peran BPKP sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, serta mengakomodir kebutuhan Pemerintah Daerah akan peran BPKP. Selain itu, Program Penataan dan Penguatan Organisasi dilakukan melalui upaya untuk menguatkan kelembagaan dari unit pengelola kehumasan yang juga menjembatani penyaluran informasi ke masyarakat, adanya unit pengelola yang menangani peningkatan kapasitas dan kompetensi baik untuk lingkungan BPKP maupun luar BPKP, serta adanya mekanisme koordinasi baik melalui forum, rakor maupun media lainnya.

Penataan organisasi dilakukan juga dengan melakukan restrukturisasi pada 13 (tiga belas) Perwakilan BPKP yaitu dengan menghilangkan jabatan struktural eselon III menjadi Pejabat Fungsional Koordinator Pengawasan.

Reorganisasi tersebut adalah sebagai implementasi Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP.

Perkembangan berikutnya organisasi BPKP adalah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Amanat tersebut mengharuskan BPKP melakukan penyesuaian Susunan Organisasi dan Struktur sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan tersebut.

Proses selanjutnya penguatan kelembagaan BPKP akan dilakukan terhadap 20 (dua puluh) Perwakilan lainnya. Namun demikian, berbekal dari restrukturisasi pada 13 (tiga belas) Perwakilan BPKP tersebut, upaya reorganisasi berikutnya perlu persiapan lebih matang apabila dikaitkan dengan terbitnya Perpres 192 Tahun 2014. Persiapan dimaksud terkait dengan peningkatan kualitas SDM melalui mapping kompetensi baik *hard* maupun *soft competency*. Untuk itu, BPKP telah menyiapkan rencana dan jadwal reorganisasi yang direncanakan dapat diselesaikan pada September 2016.

Penguatan kelembagaan BPKP juga dilakukan dengan rencana pembentukan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara. Terhadap hal ini BPKP telah memohon ke Menteri PAN dan RB, sesuai Surat Nomor S-471/K/SU/2014 tanggal 4 Juli 2014.

4. Program Penguatan Tata Laksana

Program Penataan Tata Laksana dilakukan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur di BPKP.

Permasalahan utama dalam penataan tatalaksana adalah belum sepenuhnya terbangunnya proses manajemen pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi, belum terlaksananya seluruh

tugas dan fungsi sesuai prosedur kerja yang telah diformalkan, dan belum terbangunnya indikator kinerja utama (IKU) yang selaras dengan penetapan strategi.

5. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur di BPKP, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

Permasalahan utama dalam penataan sistem manajemen SDM Aparatur di BPKP adalah alokasi pegawai dalam hal kuantitas, kualitas, serta distribusi PNS menurut unit kerja yang tidak seimbang dan tingkat produktivitas PNS yang dinilai masih rendah. Manajemen SDM Aparatur dirasakan belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai, dan organisasi.

Selain itu, sistem remunerasi bagi pegawai negeri di lingkungan BPKP belum sepenuhnya didasarkan pada bobot pekerjaan/jabatan yang diperoleh dari evaluasi jabatan. Gaji pokok yang ditetapkan berdasarkan golongan/pangkat tidak sepenuhnya mencerminkan beban tugas dan tanggung jawab. Tunjangan kinerja yang diberlakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2014 mengenai Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan BPKP, belum sepenuhnya dikaitkan dengan kinerja pegawai.

6. Program Penguatan Pengawasan

Program Penguatan Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di BPKP. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Penguatan Pengawasan di BPKP dilakukan dengan pembangunan sistem pengawasan. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan sistem dalam proses perencanaan penugasan, pelaksanaan dan pelaporan pengawasan, sehingga kegiatan pengawasan intern dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa area yang menjadi obyek pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan.

Pembangunan sistem pengawasan juga memberikan nilai tambah

bagi kegiatan pengawasan melalui identifikasi peluang untuk meningkatkan capaian tujuan organisasi dan efektivitas operasional serta tercegahnya dan terdeteksinya kejadian atau tindakan penyimpangan dari prosedur, kebijakan, atau persyaratan kontrak.

Selain itu, penguatan pengawasan dilakukan dengan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di seluruh unit kerja BPKP.

7. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja dilakukan dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka Penguatan Akuntabilitas Kinerja, BPKP telah menyusun Renstra 2010-2014 dan Penyusunan Rencana Kinerja BPKP 2014, serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan akuntabilitas kinerja tersebut telah didukung oleh laporan akuntabilitas kinerja unit kerja mandiri dan sistem data kinerja melalui aplikasi *Integrated Performance Management System* (IPMS).

LAKIP BPKP yang telah dilakukan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah laporan akuntabilitas kinerja tahun 2013 dengan nilai A.

Peningkatan akuntabilitas kinerja BPKP ditandai juga dengan peningkatan transparansi informasi melalui website BPKP, dengan dibukanya layanan informasi publik dan layanan pengaduan masyarakat.

8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program Peningkatan Kualitas Layanan Publik dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di BPKP sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pelayanan yang diberikan oleh BPKP tidak secara langsung bersentuhan dengan publik. Pengukuran tingkat kepuasan dilihat dari pemanfaatan hasil kerja BPKP oleh para *stakeholder*, baik dari eksternal maupun internal.

Kebijakan lain terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan adalah diterbitkannya Peraturan Kepala BPKP Nomor 28 Tahun 2013

tentang Sistem Pelayanan Terpadu Berbasis Elektronik dan Perka Nomor 29 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik. Selengkapnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPKP periode 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel Daftar Dokumen Capaian Reformasi Birokrasi BPKP sampai dengan tahun 2014, sebagai berikut:

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/TARGET YANG INGIN DICAPAI	CAPAIAN BPKP s.d TAHUN 2014
I. 1. a.	Program Penataan Pola Pikir dan Budaya Kerja Meningkatkan Komitmen Pimpinan dan Pegawai dalam melakukan reformasi Birokrasi Pembentukan tim manajemen perubahan <ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya Tim Manajemen Perubahan 	Pembentukan Tim/Satgas dan Pelaksanaan kegiatan terkait dengan manajemen perubahan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) SK Tim Reformasi Birokrasi 2) SK Satgas Penyelenggaraan SPIP 3) SK Tim Pengembangan Budaya Kerja 4) SK <i>Role Model</i> Budaya Kerja
b.	Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi <ul style="list-style-type: none"> • Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi serta terbangunnya komitmen, partisipasi dan perubahan perilaku yang diinginkan • Penyempurnaan dan Perbaikan Action Plan Reformasi Birokrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Road Map</i> dan Penyempurnaan <i>Road Map</i> RB BPKP 2) Work Plan Reformasi Birokrasi 3) Perka 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per 604/K/SU/2012 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
c.	Tersusunnya Strategi Komunikasi <ul style="list-style-type: none"> • Reviu strategi Komunikasi • <i>Bench Learning</i> ke K/LPNK Lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sosialisasi dan Pengkomunikasian melalui website BPKP, Mailing List BPKP, dan Rapat Kerja 2) Forum RB <i>online</i> BPKP 3) Pelatihan di Kementerian PAN dan RB 4) Pelatihan dengan narasumber dari KemenPAN dan RB

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ TARGET YANG INGIN DICAPAI	CAPAIAN BPKP s.d TAHUN 2014
2. a. b.	Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja Terbangunnya komitmen , partisipasi dan perubahan perilaku yang diinginkan Peningkatan efektifitas kebijakan	1) Keterlibatan aktif dan berkelanjutan dari pimpinan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2) Media komunikasi pelaksanaan RB yaitu website BPKP, Forum PMPRB online, mailing list, TV Display 3) Pembentukan <i>Role Model</i> sebagai <i>agent of change</i> secara formal melalui SK Kepala BPKP 4) Pernyataan komitmen Integritas seluruh Pegawai BPKP
II. 1.	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lain <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kajian sebagai upaya Identifikasi dan upaya revisi atas Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang tumpang tindih • Melakukan kajian sebagai upaya Identifikasi dan upaya revisi atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak harmonis 	Penataan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh BPKP, yaitu: 1) Penyusunan Perka BPKP Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat BPKP 2) Pembuatan Legal Drafting dalam proses penyusunan Perka BPKP
2.	Meningkatnya efektifitas pengelolaan peraturan perundang- undangan	3) Peraturan perundang-undangan telah terklasifikasi di dalam media website BPKP (database digital) 4) SOP Penyusunan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 5) Pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang multitafsir (Perka BPKP Nomor 1, 9, 30, dan 33 Tahun 2014)
III. 1.	PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal	1) Laporan Evaluasi Kelembagaan Struktur Organisasi BPKP Nomor LAP-39/SU/02/4/2013 tanggal 31 Mei 2013

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ TARGET YANG INGIN DICAPAI	CAPAIAN BPKP s.d TAHUN 2014
	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur Organisasi dengan pembagian tugas yang jelas • Pemberdayaan tugas dan fungsi internal • Ukuran organisasi yang tepat (<i>right size</i>) berdasarkan <i>benchmarking</i> • Penajaman tugas unit kerja pelayanan publik Optimalisasi Unit Kerja yang Menangani Organisasi, Ketatalaksanaan, Kehumasan, Pelayanan Publik, Kepegawaian dan Kediklatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perka BPKP Nomor PER-955/K/SU/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Pembentukan Perwakilan Madya 2) Perpres 192 Tahun 2014 tentang BPKP 3) Perka 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Sulawesi Tenggara 4) Perka Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP 5) Perka 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Kepala BPKP Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Sulawesi Tenggara 6) Perka 20 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provisin Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Papua Barat
2.	<p>Meningkatnya kapasitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya unit kerja yang menangani unit organisasi tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian, dan diklat 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Biro Kepegawaian dan Organisasi 2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan 3) Perka 16 Tahun 2014 tentang Koordinator Pengawasn di Lingkungan BPKP

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ TARGET YANG INGIN DICAPAI	CAPAIAN BPKP s.d TAHUN 2014
IV. 1.	PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA Meningkatnya penggunaan TI dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan	
a.	Pembangunan dan Pengembangan <i>e-government</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>e-office</i> : pelaksanaan atas beberapa kegiatan administrasi perkantoran dengan menggunakan aplikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>e-office</i> BPKP melalui Portal app.bpkp.go.id 2) Grand Desain Sistem Informasi BPKP 3) Saluran Pengaduan Masyarakat melalui website BPKP
b.	Optimalisasi Penggunaan TI <ul style="list-style-type: none"> Sistem informasi dengan pengelolaan database yang memanfaatkan DMS 	<ol style="list-style-type: none"> 4) <i>Document Management System</i> (DMS) 5) Websiste www.bpkp.go.id yang selalu <i>update</i> 6) Grand Desain Sistem Informasi BPKP
2.	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintah Tersusunnya SOP penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pedoman dan SOP <i>Core Bisnis</i> BPKP (Katalog Pedoman dan SOP BPKP) 2) Laporan Evaluasi Mandiri SOP secara berkala 3) Pedoman Penyusunan SOP 4) Pedoman Evaluasi SOP 5) Sinkronisasi dan Harmonisasi SOP dengan Urjab
V. 1.	PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur Terbangunnya sistem informasi kepegawaian sesuai tujuan instansi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan <i>Human Resources Information System</i> (HRIS) 2) Sistem Informasi Kepegawaian (sispedap) berbasis <i>self assessment</i>
2.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur	
a.	Sistem Rekrutmen yang terbuka, tranparan dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengumuman rekrutmen melalui <i>website</i> www.bpkp.go.id dan media cetak 2) Pendaftaran melalui website www.bpkp.go.id 3) Tes rekrutmen menggunakan komputer (CAT)
b.	Promosi jabatan dilakukan secara terbuka	Seleksi Jabatan pimpinan tinggi dengan sistem <i>open bidding</i>

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ TARGET YANG INGIN DICAPAI	CAPAIAN BPKP s.d TAHUN 2014
c.	Peningkatan profesionalisme SDM Aparatur	1) Pengembangan SDM melalui Human Capital Development Program (HCDP) 2) Analisis Beban Kerja dan Jabatan (ABKJ) 3) Dokumen Perencanaan Kebutuhan Pegawai Selama 5 Tahun 4) Pelaksanaan Evaluasi Jabatan 5) <i>Assessment</i> dan <i>mapping</i> kompetensi pegawai
d.	Peningkatan disiplin SDM Aparatur <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Kinerja Individu 	1) Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) 2) Aplikasi SKP dan PPK yang terintegrasi dalam IPMS
VI.	PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN	
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara	Opini WTP Laporan Keuangan BPKP
2.	Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang	
a.	Pengendalian Gratifikasi	Perka Nomor 33 Tahun 2013 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPKP
b.	Penerapan SPIP	1) Perka BPKP Nomor PER-1390 Tahun 2011 tentang Desain dan Pedoman Penyelenggaraan SPIP BPKP 2) Perka No PER-690 tentang Pedoman Pemantauan Penyelenggaraan SPIP 3) Aplikasi Pemantauan SPIP BPKP
c.	Pengaduan Masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i>	1) Perka Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan BPKP 2) Kep 94/K/SU/2014 tentang Pejabat Penerima Pengaduandi Lingkungan BPKP
d.	Penanganan Benturan Kepentingan	Perka Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman BenturanKepentingan di Lingkungan BPKP
e.	Pembangunan Zona Integritas	Pencanangan Pembangunan Zona Integritas tanggal 9 Januari 2014
f.	Peran APIP	1) Peran Inspektorat sebagai <i>Quality Assurance</i> di internal BPKP 2) Optimalisasi leveling kapabilitas Inspektorat BPKP berdasarkan konsep IACM

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ TARGET YANG INGIN DICAPAI	CAPAIAN BPKP s.d TAHUN 2014
		3) Audit operasional tugas dan kegiatan unit kerja
VII.	PROGRAM Penguatan Akuntabilitas Kinerja	
1.	Meningkatnya Kinerja BPKP	1) Pengukuran Kinerja Organisasi dengan Kinerja Individu melalui <i>Integrated Performance Management System</i> (IPMS) 2) Pengembangan Dashboard Desk Kepala BPKP
2.	Meningkatnya Akuntabilitas BPKP	1) LAKIP BPKP Kategori "A" 2) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Berbasis SIMONEV
VIII.	PROGRAM Peningkatan Kualitas Layanan Publik	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1) Perka BPKP Nomor 29 Tahun 2013 tentang Standar Layanan Informasi Publik 2) Perka BPKP Nomor 28 Tahun 2013 tentang Sistem Pelayanan Terpadu Berbasis Elektronik 3) <i>Updating</i> ISO 9001:2008 untuk Sistem Layanan Penyelenggaraan Diklat dan Sistem Pengawasan PHLN

B. Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi BPKP

1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Reformasi Birokrasi pada tingkatan instansional/mikro yang akan dilaksanakan oleh BPKP sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Hasil Diharapkan (Output)
1.	Manajemen Perubahan	1. Pembentukan tim manajemen perubahan yang dapat mendorong terjadinya pola pikir	Tim Manajemen Perubahan
		2. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas	Perka Budaya Organisasi
		3. Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi	Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, dan keterlibatan semua pegawai dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi
2.	Penguatan Pengawasan	1. Pembangunan unit kerja untuk mencapai kinerja tinggi	Unit kerja dengan predikat kinerja tinggi
		2. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi di masing-masing unit kerja BPKP	Pelaporan pengendalian gratifikasi setiap triwulan
		3. Pelaksanaan <i>whistle blowing system</i> di lingkungan BPKP	Pelaporan pengelolaan WBS BPKP setiap triwulan
		4. Penyelenggaraan SPIP	Maturitas Penyelenggaraan SPIP BPKP Level 3
		5. Penanganan pengaduan masyarakat	Tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat
3.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Penguatan akuntabilitas kinerja	Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja
		2. Pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja	Sistem yang mendukung tercapainya kinerja organisasi yang terukur
4.	Penguatan Kelembagaan	Evaluasi dan restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja	Struktur organisasi yang tepat fungsi yang mendorong percepatan Reformasi Birokrasi
5.	Penguatan Tatalaksana	1. Penyelenggaraan SOP pelaksanaan tugas dan fungsi	Dokumen SOP atas pelaksanaan tugas dan fungsi
		2. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik
		3. Pengembangan <i>e-government</i>	Tersedianya <i>e-government</i>

No.	Program	Kegiatan	Hasil Diharapkan (<i>Output</i>)
6.	Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	1. Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai	Terbangunnya sistem informasi kepegawaian yang andal
		2. Penataan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi	Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, dan akuntabel
		3. Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi	Terbentuknya <i>talent pool</i> untuk pengembangan karir pegawai
		4. Analisis jabatan	Dokumen peta dan uraian jabatan
		5. Penyusunan standar kompetensi jabatan	Dokumen kualifikasi jabatan
		6. Asesmen individu berdasarkan jabatan	Profil kompetensi individu
		7. Perumusan dan penetapan pola karir	Dokumen Pola Karir
		8. Perumusan dan penetapan pola mutasi	Dokumen Pola Mutasi
		9. Penerapan sistem penilaian kinerja individu	Kinerja individu yang terukur
		10. Pembangunan dan pengembangan <i>database</i> pegawai	Ketersediaan data pegawai yang mutakhir dan akurat
		11. Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi	Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi
7.	Penguatan Peraturan Perundang-undangan	Penataan proses perumusan regulasi	Meningkatnya keterlibatan unit kerja dalam proses perumusan kebijakan
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Pembangunan dan pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
		2. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Meningkatnya partisipasi masyarakat

Hasil yang diharapkan tersebut selanjutnya akan dicapai dengan melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja sebagai berikut:

No.	Program/Hasil yang Diharapkan	Rencana Kerja	Tahun					PIC
			2015	2016	2017	2018	2019	
I	Manajemen Perubahan							
1.	Tim Manajemen Perubahan	1. Pembentukan Tim Manajemen Perubahan	√					Biro Kepegawaian dan Organisasi
		2. Pembaruan Tim Manajemen Perubahan		√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi
		3. Penyusunan laporan kegiatan Tim Manajemen Perubahan	√	√	√	√	√	Tim Manajemen Perubahan
2.	Perka Budaya Organisasi	1. Penyusunan revisi Perka Budaya Organisasi	√					Biro Kepegawaian dan Organisasi
		2. Pembentukan Tim Pengembangan Budaya Organisasi	√	√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi
		3. Penetapan revisi Perka Budaya Organisasi		√				Biro Kepegawaian dan Organisasi
		4. Sosialisasi dan internalisasi Perka Budaya Organisasi		√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi
		5. <i>Role model</i> budaya organisasi		√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi
		6. Forum koordinasi budaya organisasi			√		√	Biro Kepegawaian dan Organisasi
3.	Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, dan keterlibatan semua pegawai dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi	1. Penyusunan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019	√					Tim Manajemen Perubahan
		2. Sosialisasi dan Internalisasi Perka Reformasi Birokrasi	√	√	√			Tim Manajemen Perubahan
		3. Monitoring terhadap unit kerja yang telah melakukan sosialisasi dan internalisasi program Budaya Kerja	√	√	√	√	√	Tim Manajemen Perubahan
		4. Forum koordinasi Reformasi Birokrasi			√		√	Tim Manajemen Perubahan

No.	Program/Hasil yang Diharapkan	Rencana Kerja	Tahun					PIC
			2015	2016	2017	2018	2019	
II	Penguatan Pengawasan							
1.	Unit kerja dengan predikat kinerja tinggi	1. Pembentukan Tim Penilai/Evaluasi Kompetisi Adi Pakarti		√				Biro Kepegawaian dan Organisasi
		2. Perbaikan dan perumusan kriteria Adi Pakarti (termasuk kriteria WBK dan WBBM)		√				Biro Kepegawaian dan Organisasi Inspektorat
		3. Penyelenggaraan kompetisi Adi Pakarti		√		√		Biro Kepegawaian dan Organisasi
		4. Evaluasi kinerja di unit-unit kerja BPKP	√	√	√	√	√	Inspektorat
		5. Audit operasional pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit kerja BPKP	√	√	√	√	√	Inspektorat
		6. Peningkatan penyelenggaraan SPIP	√	√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi
		7. Evaluasi penyelenggaraan SPIP	√	√	√	√	√	Inspektorat
		8. Pembangunan dan pengembangan aplikasi pemantauan penyelenggaraan SPIP	√	√	√			Biro Kepegawaian dan Organisasi
		9. Peningkatan penerapan <i>risk assessment</i> di unit-unit kerja BPKP		√	√	√	√	Inspektorat
		10. Peningkatan implementasi Program Anti Korupsi	√	√	√	√	√	Inspektorat
		11. Pemantauan optimalisasi penyerapan anggaran	√	√	√	√	√	Biro Keuangan
		12. Optimalisasi pelaksanaan <i>e-procurement</i> pengadaan barang/jasa di lingkungan BPKP		√	√	√	√	Biro Umum
		13. Optimalisasi peran Inspektorat BPKP sebagai <i>Quality Assurance</i> di internal BPKP	√	√	√	√	√	Inspektorat
		14. Peningkatan pelaksanaan audit oleh Inspektorat melalui pendekatan berbasis risiko (<i>risk based audit</i>)		√	√	√	√	Inspektorat
		15. Peningkatan peran Inspektorat sebagai <i>early warning system</i> dalam mempertahankan opini WTP	√	√	√	√	√	Inspektorat
		16. Optimalisasi leveling kapabilitas Inspektorat BPKP berdasarkan konsep IACM		√	√			Inspektorat
		17. Opini WTP Laporan Keuangan BPKP	√	√	√	√	√	Inspektorat
		18. Peningkatan kapabilitas BPKP (level 3 berdasarkan konsep IACM)		√	√	√	√	Inspektorat

No.	Program/Hasil yang Diharapkan	Rencana Kerja	Tahun					PIC
			2015	2016	2017	2018	2019	
2.	Pelaporan pengendalian gratifikasi	1. Pembaruan Satgas Gratifikasi di lingkungan BPKP	√	√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi
		2. Pemantauan pelaksanaan pengendalian gratifikasi	√	√	√	√	√	Inspektorat
		3. Koordinasi pengendalian gratifikasi dengan KPK		√	√	√	√	Inspektorat
3.	Pelaporan pengelolaan WBS BPKP	1. Penyusunan mekanisme penanganan pengaduan	√					Biro Kepegawaian dan Organisasi
		2. Sosialisasi mekanisme penanganan pengaduan		√				Biro Kepegawaian dan Organisasi Inspektorat
		3. Penerapan <i>whistle blowing system</i>	√	√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi Inspektorat
		4. Evaluasi penerapan <i>whistle blowing system</i>		√				Inspektorat
		5. Audit khusus atas laporan <i>whistle blowing system</i>	√	√	√	√	√	Inspektorat
		6. Pemantauan tindak lanjut hasil audit khusus		√	√	√	√	Inspektorat
4.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP BPKP Level 3	1. Peningkatan lingkungan pengendalian	√	√	√	√	√	Inspektorat
		2. Penanganan risiko (identifikasi risiko dan pengendalian risiko)	√	√	√	√	√	Inspektorat
		3. Penguatan aktivitas pengendalian	√	√	√	√	√	Inspektorat
		4. Pemantauan berkelanjutan penyelenggaraan SPIP	√	√	√	√	√	Inspektorat
5.	Tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat	1. Pembangunan saluran pengaduan	√	√				Pusinfowas BPKP Biro Hukum dan Humas Inspektorat
		2. Penanganan pengaduan masyarakat	√	√	√	√	√	Inspektorat
		3. Tindak lanjut atas penanganan pengaduan	√	√	√	√	√	Inspektorat

No.	Program/Hasil yang Diharapkan	Rencana Kerja	Tahun					PIC
			2015	2016	2017	2018	2019	
III	Penguatan Akuntabilitas Kinerja							
1.	Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja	1. Perumusan dan penetapan Renstra BPKP Tahun 2015-2019	√					Biro Perencanaan Pengawasan
		2. Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin)	√	√	√	√	√	Biro Perencanaan Pengawasan
		3. Penyelenggaraan diklat akuntabilitas kinerja		√		√		Pusdiklatwas BPKP
		4. Penyusunan pedoman akuntabilitas kinerja		√				Biro Perencanaan Pengawasan
		5. Evaluasi kinerja unit-unit kerja BPKP untuk peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja	√	√	√	√	√	Inspektorat
		6. Pemantauan tindak lanjut atas peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja	√	√	√	√	√	Inspektorat
		7. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja	√	√	√	√	√	Biro Perencanaan Pengawasan
		8. Meningkatkan hasil evaluasi kinerja terhadap LAKIP BPKP dalam kategori A	√	√	√	√	√	Biro Perencanaan Pengawasan
2.	Sistem yang mendukung tercapainya kinerja organisasi yang terukur	1. Pengembangan <i>Integrated Performance Management Systems</i> (IPMS) untuk mendukung akuntabilitas kinerja	√	√	√	√	√	Pusinfowas BPKP
		2. Penerapan <i>Integrated Performance Management Systems</i> (IPMS) untuk mendukung akuntabilitas kinerja	√	√	√	√	√	Pusinfowas BPKP
		3. Pengembangan sistem <i>dashboard desk</i> Kepala BPKP	√	√	√	√	√	Pusinfowas BPKP
IV	Penguatan Kelembagaan							
	Struktur organisasi yang tepat fungsi yang mendorong percepatan Reformasi Birokrasi	1. Restrukturisasi organisasi dan tata kerja BPKP	√	√				Biro Kepegawaian dan Organisasi
		2. Pengajuan usulan struktur organisasi baru BPKP sesuai PP Nomor 192 Tahun 2014		√				Biro Kepegawaian dan Organisasi
		3. Perumusan pola hubungan jabatan struktural dan fungsional	√	√				Biro Kepegawaian dan Organisasi
		4. Evaluasi jabatan	√	√				Biro Kepegawaian dan Organisasi
		5. Analisis Beban Kerja dan Jabatan (ABKJ)	√	√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi
		6. Penerapan Sasaran Kinerja Individu (SKI)	√	√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi

Program/Hasil yang Diharapkan	Rencana Kerja	Tahun					PIC
		2015	2016	2017	2018	2019	
Penguatan Tatalaksana							
Dokumen SOP atas pelaksanaan tugas dan fungsi	1. Penerapan SOP pada pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP (<i>business process</i>) secara berkesinambungan	√	√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi
	2. <i>Quality assurance</i> penyusunan SOP	√	√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi
	3. Monitoring dan evaluasi SOP	√	√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi
Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik	1. Perumusan dan penyediaan sarana informasi pelayanan kepada masyarakat melalui <i>website</i> BPKP	√	√	√	√	√	Biro Hukum dan Humas Pusinfowas BPKP
	2. Penyediaan informasi kepada masyarakat melalui <i>website</i> BPKP	√	√	√	√	√	Biro Hukum dan Humas
	3. Penetapan kebijakan keterbukaan informasi publik	√					Biro Hukum dan Humas
	4. Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik	√	√	√	√	√	Biro Hukum dan Humas
Tersedianya <i>e-government</i>	1. Penerapan sistem informasi atas pelaksanaan perencanaan dan realisasinya (<i>e-planning</i>)	√	√	√	√	√	Biro Perencanaan Pengawasan Pusinfowas BPKP
	2. Penerapan sistem informasi atas pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran (<i>e-office</i>)	√	√	√	√	√	Biro Umum Pusinfowas BPKP
	3. Penerapan sistem informasi atas pelaksanaan penganggaran (<i>e-budgetting</i>)	√	√	√	√	√	Biro Keuangan Pusinfowas BPKP
	4. Penerapan sistem informasi atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa	√	√	√	√	√	Biro Umum Pusinfowas BPKP
	5. Penerapan sistem informasi atas pengukuran kinerja individu (<i>e-performance</i>)	√	√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi Pusinfowas BPKP
	6. Pengembangan sistem informasi <i>database</i> kepegawaian		√	√	√	√	
	7. <i>Update website</i> BPKP	√	√	√	√	√	Biro Hukum dan Humas Pusinfowas BPKP

No.	Program/Hasil yang Diharapkan	Rencana Kerja	Tahun					PIC
			2015	2016	2017	2018	2019	
6.	Profil kompetensi individu	1. Pengembangan SDM melalui <i>Human Capital Development Programs</i>	√	√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi
		2. Pengembangan <i>Integrated Human Resources Information System</i>	√	√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi
		3. Pelaksanaan <i>assessment</i> bagi pegawai	√	√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi
7.	Dokumen Pola Karir	1. Perumusan kebijakan pola karir	√	√				Biro Kepegawaian dan Organisasi
		2. Sinkronisasi melalui perumusan kebijakan hubungan jabatan struktural dengan jabatan fungsional	√	√				Biro Kepegawaian dan Organisasi
8.	Dokumen Pola Mutasi	1. Perumusan kebijakan pola mutasi dan promosi	√	√				Biro Kepegawaian dan Organisasi
		2. <i>Open bidding</i> pengisian jabatan pimpinan tinggi	√	√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi
		3. <i>Assessment</i> untuk seleksi pengangkatan jabatan fungsional auditor	√	√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi
9.	Kinerja individu yang terukur	1. Sosialisasi peraturan kedisiplinan dan aturan perilaku pegawai	√	√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi
		2. Pengembangan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang SKP	√	√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi
		3. Penetapan kinerja individu	√	√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi
		4. Penerapan aplikasi Sasaran Kinerja Individu (SKI)	√	√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi
		4. Penilaian kinerja individu secara berkala	√	√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi
		5. Pemantauan dan pelaporan penegakkan disiplin pegawai	√	√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi
10.	Ketersediaan data pegawai yang mutakhir dan akurat	1. Pemutakhiran data pegawai melalui Sispedap BPKP	√	√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi
		2. Pengembangan <i>Human Resources Information System (HRIS)</i>	√	√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi
		3. Pengembangan sistem informasi kepegawaian sebagai dukungan pengambilan kebijakan manajemen SDM	√	√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi
11.	Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi	1. Pengembangan pola diklat berbasis kompetensi	√	√	√	√	√	Pusdiklatwas BPKP
		2. Penyediaan diklat yang menyesuaikan kebutuhan auditor berstandar internasional		√	√	√	√	Pusdiklatwas BPKP

No.	Program/Hasil yang Diharapkan	Rencana Kerja	Tahun					PIC
			2015	2016	2017	2018	2019	
VI	Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur							
1.	Terbangunnya sistem informasi kepegawaian yang andal	1. Pengembangan <i>Human Resources Information System</i> (HRIS)	√	√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi Pusinfowas BPKP
		2. Updating dokumen <i>Human Capital Development Programs</i> (HCDP)	√	√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi
2.	Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, dan akuntabel	1. Reviu atas sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, dan akuntabel	√	√		√		Biro Kepegawaian dan Organisasi
		2. Penggunaan <i>Computer Assisted Test</i> (CAT) dalam penerimaan pegawai		√		√		Biro Kepegawaian dan Organisasi
		3. Optimalisasi peran <i>Management Assessment Center</i> (MAC) dalam penerimaan pegawai		√		√		Biro Kepegawaian dan Organisasi
		4. Pengumuman penerimaan melalui media massa dan media berbasis internet		√		√		Biro Kepegawaian dan Organisasi
3.	Terbentuknya <i>talent pool</i> untuk pengembangan karir pegawai	1. Perumusan kebijakan pengembangan karir pegawai		√				Biro Kepegawaian dan Organisasi
		2. <i>Assessment</i> pegawai	√	√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi
		3. Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	√	√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi
		4. Pengembangan SDM melalui <i>Human Capital Development Programs</i>	√	√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi
4.	Dokumen peta dan uraian jabatan	1. Penyusunan peta jabatan dan uraian jabatan		√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi
		2. Evaluasi berkala peringkat jabatan (<i>job pricing</i>)		√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi
		3. Penerapan <i>job pricing</i> baru		√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi
5.	Dokumen kualifikasi jabatan	1. Penyusunan peta jabatan dan peta karir		√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi
		2. Penerapan <i>job pricing</i> baru		√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi

No.	Program/Hasil yang Diharapkan	Rencana Kerja	Tahun					PIC
			2015	2016	2017	2018	2019	
VII	Penguatan Peraturan Perundang-undangan							
	Meningkatnya keterlibatan unit kerja dalam proses perumusan kebijakan	1. Pembentukan Tim Pengkajian Peraturan Perundang-undangan	√	√	√	√	√	Biro Hukum dan Humas
		2. Pelaksanaan <i>legislative drafting</i>	√	√	√	√	√	Biro Hukum dan Humas
		3. Pelibatan unit kerja BPKP dalam perumusan peraturan perundang-undangan	√	√	√	√	√	Biro Hukum dan Humas
		4. Pengarsipan <i>database</i> peraturan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	√	√	√	√	√	Biro Hukum dan Humas
		5. Sosialisasi peraturan melalui media <i>online</i> di www.bpkp.go.id	√	√	√	√	√	Biro Hukum dan Humas
		6. Survei kepuasan pengguna layanan	√	√	√	√	√	Biro Hukum dan Humas
VIII	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik							
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Perumusan standar layanan BPKP	√	√				Kedeputian
		2. Reviu dan inventarisasi SOP secara berkala	√	√	√	√	√	Biro Kepegawaian dan Organisasi
		3. Penyediaan informasi kepada masyarakat melalui <i>website</i> BPKP	√	√	√	√	√	Biro Hukum dan Humas
		4. Penerbitan Majalah Pengawasan	√	√	√	√	√	Biro Hukum dan Humas
		5. Perumusan dan penyediaan sarana informasi pelayanan kepada masyarakat melalui <i>website</i> BPKP	√	√	√	√	√	Inspektorat Biro Hukum dan Humas
		6. Pengembangan pelayanan melalui inovasi pelayanan	√	√	√	√	√	Kedeputian
		7. Menjalin kerja sama dengan media massa dalam rangka <i>public awareness campaign</i>	√	√	√	√	√	Biro Hukum dan Humas
		8. Perbaiki proses bisnis untuk mempertahankan standar ISO 9001:2008 untuk Sistem Layanan Penyelenggaraan Diklat dan Sistem Pengawasan PHLN	√	√	√	√	√	Pusdiklatwas BPKP Kedeputian Perekonomian dan Kemaritiman
		9. Perbaiki proses bisnis untuk mempertahankan akreditasi A dari LAN terhadap penyelenggaraan diklat	√	√	√	√	√	Pusdiklatwas BPKP
2.	Peningkatan partisipasi masyarakat	1. Pembentukan unit layanan pengaduan		√				Inspektorat
		2. Penanganan pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya	√	√	√	√	√	Inspektorat
		3. Pelaksanaan survei kepuasan terhadap kemanfaatan/layanan BPKP	√	√	√	√	√	Kedeputian
		4. Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan	√	√	√	√	√	Kedeputian

2. *Quick win*

Program *Quick wins* Reformasi Birokrasi Instansional adalah program *quick wins* yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh masing-masing instansi. Instansi memilih *quick wins* yang sejalan dengan bidang tugas utamanya. *Quick wins* sendiri adalah langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam Reformasi Birokrasi. *Quick wins* ini bermanfaat untuk mendapatkan momentum yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri instansi dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

BPKP telah menetapkan *quick wins* sebagaimana tabel berikut:

No.	Program	Kegiatan	Output
1.	Manajemen Perubahan	Peningkatan kepatuhan dan penanaman nilai-nilai organisasi	Penandatanganan Pakta Integritas dan pelaporan LHKASN/LHKPN
2.	Penguatan Pengawasan	Peningkatan kapabilitas APIP	Deseminasi peningkatan kapabilitas APIP dengan acuan IACM
3.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja	Pemantauan kinerja melalui aplikasi SKI
			<i>New Integrated Performance Management System (IPMS)</i>
4.	Penguatan Kelembagaan	Pembangunan <i>Whistle Blower System</i>	Mekanisme pengaduan berbasis <i>web</i>
5.	Penguatan Tatalaksana	Percepatan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah	Pengembangan SIMDA Akrual
		Peningkatan manajemen pengelolaan dana desa	Pengembangan SIMDA Desa
		Percepatan pemenuhan kebutuhan auditor untuk APIP	<i>E-Learning</i> Pusdiklatwas
6.	Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Promosi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi	Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui <i>open bidding</i>
7.	Penguatan Peraturan Perundang-undangan	Pelayanan penelaahan dan bantuan hukum	<i>Legislative drafting</i>
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan informasi publik	Penyediaan layanan informasi publik di laman <i>www.bpkp.go.id</i>

C. Kriteria Keberhasilan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015, Reformasi Birokrasi ditujukan pada pencapaian tiga sasaran, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Oleh karena itu, BPKP kemudian menetapkan delapan area perubahan reformasi dan hasil yang diharapkan sebagaimana tabel sebagai berikut:

No.	Area Program Perubahan	Hasil Diharapkan (<i>Outcome</i>)
1.	Manajemen Perubahan	Meningkatnya integritas dan kinerja birokrasi
2.	Penguatan Pengawasan	Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
3.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja
4.	Penguatan Kelembagaan	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
5.	Penguatan Tatalaksana	Sistem dan prosedur kerja yang jelas, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
6.	Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Meningkatnya SDM aparatur yang kompeten dan profesional
7.	Penguatan Peraturan Perundang-undangan	Tertatanya regulasi
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Reformasi Birokrasi BPKP harus dapat dipastikan berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Untuk itu peran Inspektorat BPKP sebagai evaluator dan *quality assurance* dalam melakukan reviu dan evaluasi menjadi salah satu kunci bagi keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPKP.

D. Target *Outcome*

Tercapainya *outcome* dari setiap area perubahan ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Target dan bagaimana IKU diukur adalah sebagaimana tabel berikut:

No.	Area Program Perubahan	Hasil Diharapkan (Outcome)	IKU	Target					
				Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Manajemen Perubahan	Meningkatnya integritas dan kinerja birokrasi	Persepsi <i>stakeholder</i> terhadap peran BPKP	%	82	83	83	84	84
			<u>Metode Pengukuran</u> Survei atas peran BPKP dengan ukuran skala 4 yang dikonversi ke dalam persentase						
			Persepsi publik yang positif terhadap BPKP	%	83	84	84	85	85
			<u>Metode Pengukuran</u> Mengidentifikasi pemberitaan positif terhadap BPKP di media massa dan <i>outline</i> dibandingkan dengan jumlah seluruh pemberitaan mengenai BPKP						
			Persentase capaian penugasan pengawasan	%	90	90	91	92	92
			<u>Metode Pengukuran</u> Mengukur tercapainya rencana pengawasan dengan membandingkan antara realisasi penugasan pengawasan dengan rencana penugasan pengawasan						
			Persentase penugasan atas permintaan mitra kerja	%		45	47	47	48
			<u>Metode Pengukuran</u> Mengukur tingkat kepercayaan mitra kerja atas kinerja BPKP dengan membandingkan antara realisasi PP atas permintaan mitra kerja dengan jumlah seluruh realisasi penugasan						
			Terwujudnya transparansi dalam rekrutmen pegawai	%		100		100	
			<u>Metode Pengukuran</u> IKU dinilai 100% apabila tidak ada komplain. Nilai akan berkurang sebesar jumlah komplain dibanding dengan jumlah peserta rekrutmen						

No.	Area Program Perubahan	Hasil Diharapkan (Outcome)	IKU	Target					
				Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
2.	Penguatan Pengawasan	Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan Inspektorat BPKP	%	81	82	83	84	85
			<u>Metode Pengukuran</u> Membandingkan antara jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan jumlah rekomendasi yang tertuang dalam laporan hasil pengawasan Inspektorat						
			Tingkat opini BPKP terhadap laporan keuangan BPKP	%	100	100	100	100	100
			<u>Metode Pengukuran</u> 100%= Wajar Tanpa Pengecualian 80% = Wajar Dengan Pengecualian 60% = Tidak Memberikan Pendapat 40% = Tidak Wajar						
			Persentase tingkat integritas BPKP berdasarkan survei eksternal	Skala Likert 1-4	3,2	3,2	3,3	3,3	3,4
			<u>Metode Pengukuran</u> Survei oleh pihak eksternal dengan mengukur tingkat integritas dan potensi KKN di lingkungan BPKP						
3.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja	Tercapainya target nilai A atas hasil evaluasi LAKIP BPKP	%	100	100	100	100	100
			<u>Metode Pengukuran</u> Berdasarkan laporan hasil evaluasi atas LAKIP BPKP oleh Kementerian PAN dan RB 100%= AA dan A 80% = B 60% = CC dan C						
			Persentase tercapainya target kinerja anggaran	%	94	94	95	95	96
			<u>Metode Pengukuran</u> Membandingkan tingkat realisasi penyerapan anggaran dengan rencana penyerapannya (<i>disbursement plan</i>)						
			Persentase tercapainya target kinerja pegawai (realisasi penggunaan OH)	%	100	100	100	100	100
			<u>Metode Pengukuran</u> Membandingkan realisasi OH dengan rencana penggunaannya						

No.	Area Program Perubahan	Hasil Diharapkan (Outcome)	IKU	Target					
				Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
4.	Penguatan Kelembagaan	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase tercapainya reorganisasi sesuai dengan Perka BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP	%		100			
			<u>Metode Pengukuran</u> Membandingkan antara jumlah Perwakilan BPKP sesuai struktur Perka Nomor 13 Tahun 2014 dengan jumlah keseluruhan Perwakilan BPKP						
			Persentase unit kerja yang telah melakukan <i>updating</i> Analisis Beban Kerja dan Jabatan (ABKJ)	%		100			
			<u>Metode Pengukuran</u> Analisis atas dokumen ABKJ yang disusun oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi dengan unit kerja yang telah melakukan <i>updating</i> ABKJ						
5.	Penguatan Tatalaksana	Sistem dan prosedur kerja yang jelas, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>	Terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen BPKP	%	70	71	72	73	73
			<u>Metode Pengukuran</u> IKU diukur berdasarkan tingkat kematangan sistem informasi, dengan menggunakan model <i>Extended Enterprise Architecture Maturity Model (E2AMM)</i> , yang dikembangkan oleh <i>Institute For Enterprise Architecture Development (IFEAD)</i> Model pengukuran ini membagi enam tingkat kematangan sistem informasi						

No.	Area Program Perubahan	Hasil Diharapkan (Outcome)	IKU	Target					
				Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
6.	Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Meningkatnya SDM aparatur yang kompeten dan profesional	Persentase jumlah pegawai BPKP yang kompeten dan profesional di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan	%	90	90	91	91	92
			<p><u>Metode Pengukuran</u> Target IKU ini merupakan target jumlah pegawai yang meningkat kompetensinya, melalui program pendidikan formal/gelar, pendidikan non-gelar, serta seminar/<i>workshop</i> dan program pelatihan mandiri</p> <p>Metode pengukuran menggunakan ratio antara jumlah pegawai yang sudah meningkat kompetensi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan terhadap total jumlah pegawai yang dibutuhkan</p>						
			Tingkat persepsi kepuasan pelayanan pengelola kepegawaian dan organisasi	Skala Likert 1-10	8	8,1	8,2	8,2	8,3
			<p><u>Metode Pengukuran</u> IKU diukur melalui survei dengan menyebarkan kuesioner kepada para penerima layanan dalam hal ini pegawai dari seluruh unit kerja di lingkungan BPKP secara uji petik dan dihitung menggunakan metode skala <i>likert</i> 1-10</p>						
7.	Penguatan Peraturan Perundang-undangan	Tertatanya regulasi	Persentase peraturan Kepala BPKP yang telah terintegrasi melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	%	100	100	100	100	100
			<p><u>Metode Pengukuran</u> Membandingkan peraturan yang terbit pada periode tertentu dengan peraturan yang telah terintegrasi melalui JDIH</p>						
			Persentase peraturan Kepala BPKP yang sesuai dengan SOP penyusunan perka	%	100	100	100	100	100
			<p><u>Metode Pengukuran</u> Membandingkan semua peraturan yang terbit pada tahun tertentu dengan proses <i>legislative drafting</i> yang telah dilakukan</p>						

No.	Area Program Perubahan	Hasil Diharapkan (Outcome)	IKU	Target					
				Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat	Persentase tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP di K/L dan Pemda dengan skor 3	%	5	25	45	65	85
			<u>Metode Pengukuran</u> Membandingkan antara jumlah K/L dan Pemda yang tingkat kematangan dalam penyelenggaraan SPIP telah mencapai skor 3 dengan jumlah seluruh semua K/L dan Pemda						
			Tingkat kapabilitas APIP dengan skor 3	%	5	20	38	60	82
			<u>Metode Pengukuran</u> Metode pengukuran dengan <i>assessment</i> (evaluasi) penerapan tata kelola APIP yang mengacu kepada model <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM)						
			BUMN yang nilai kinerjanya minimal A	%	20	20	30	30	35
			<u>Metode Pengukuran</u> IKU diukur dengan menghitung jumlah BUMN yang mendapat skor kinerja minimal A, dibandingkan dengan jumlah BUMN yang dievaluasi oleh BPKP						
			Persentase penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum	%	85	85	86	86	87
			<u>Metode Pengukuran</u> Pengukuran IKU dihitung berdasarkan penyerahan/pelimpahan kasus melalui penerbitan dan penyerahan laporan yang ditangani BPKP kepada instansi penegak hukum						
			Tingkat persepsi kepuasan instansi pemerintah atas pelayanan BPKP	Skala Likert 1-10	8,1	8,1	8,2	8,2	8,3
			<u>Metode Pengukuran</u> IKU diukur dengan pendekatan kepuasan pelanggan (<i>customer satisfaction</i>) Metode pengukuran dengan menggunakan survei pelanggan						

E. Rencana Anggaran

Alokasi anggaran untuk keseluruhan program Reformasi Birokrasi di lingkungan BPKP bersumber dari alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPKP yang berasal dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara.

BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dilakukan dengan tujuan untuk menjamin agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi BPKP.

Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BPKP agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPKP senantiasa ada pada jalur yang telah ditetapkan dan disepakati dalam perencanaan dan implementasinya sesuai dengan *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional.

A. Monitoring

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja dan lingkup lembaga. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Kegiatan monitoring dilakukan secara terus menerus (berkelanjutan) dan konsisten dengan variabel-variabel yang telah masuk dalam ukuran assurance pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dalam kaitan dengan program Reformasi Birokrasi di lingkungan BPKP, kegiatan monitoring dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi BPKP untuk memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh seluruh unsur dan unit kerja di lingkungan BPKP. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan aktivitas Reformasi Birokrasi sesuai dengan *Road Map* yang telah disetujui.

Kegiatan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pada tiap unit kerja BPKP dilakukan minimal enam bulan sekali. Hasil monitoring disusun dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada koordinator Tim Reformasi Birokrasi BPKP.

Monitoring tersebut dapat dilakukan diantaranya melalui media sebagai berikut:

1. Pertemuan rutin dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis. Pertemuan rutin dengan pimpinan juga dilakukan pada unit/satuan kerja yang melaksanakan *Quick wins*, untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
2. Pertemuan dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan;
3. Survei terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
4. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya; dan
5. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

B. Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam rentang waktu tertentu, yaitu setiap tahun sekali. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Dalam kaitan dengan program Reformasi Birokrasi di lingkungan BPKP, evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat BPKP untuk melakukan *quality assurance* dan menilai pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh seluruh unsur dan unit kerja di lingkungan BPKP.

Setiap setahun sekali, Evaluator dan *Quality Assurance* Tim Reformasi Birokrasi BPKP melakukan evaluasi berdasarkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai *Road Map* Reformasi Birokrasi BPKP. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada Kepala BPKP selaku Penanggung Jawab untuk dibahas dalam rapat Tim Reformasi Birokrasi BPKP.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

C. Pelaporan

Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam rentang waktu tertentu, yaitu setiap tahun sekali. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Dalam kaitan dengan program Reformasi Birokrasi di lingkungan BPKP, evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat BPKP untuk melakukan *quality assurance* dan menilai pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh seluruh unsur dan unit kerja di lingkungan BPKP. Setiap setahun sekali, Evaluator dan *Quality Assurance* Tim Reformasi Birokrasi BPKP menyusun laporan konsolidasi hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi serta menyusun laporan hasil pelaksanaan penjaminan mutu pelaksanaan reformasi birokrasi di BPKP.

Laporan-laporan ini disampaikan kepada Kepala BPKP selaku Penanggung Jawab Tim Reformasi Birokrasi BPKP. Laporan monitoring dan evaluasi selanjutnya akan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019.

BAB V
PENUTUP

Reformasi Birokrasi harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan profesional. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik KKN. Semangat inilah yang mendasari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPKP.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPKP merupakan suatu langkah panjang dan berkelanjutan untuk terus dilaksanakan dengan merancang dan mengimplementasikan langkah-langkah konkrit dan terukur hasilnya. Dukungan seluruh pegawai dan komitmen tinggi pimpinan menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi Reformasi Birokrasi di BPKP.

Keberhasilan implementasi tersebut juga memerlukan langkah nyata yang direncanakan dengan baik, dikoordinasikan pelaksanaannya, dan dijalankan oleh seluruh pihak yang terkait untuk mengawal proses perubahan yang diharapkan. Pemahaman bersama tentang substansi Reformasi Birokrasi serta arah yang ingin diwujudkan, harus mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi ke arah yang lebih baik.

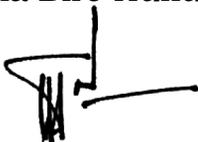
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2015 menjadi dasar bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPKP, selain Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Road Map Reformasi Birokrasi BPKP merupakan rencana atas Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman dalam menyusun dan melaksanakan Reformasi Birokrasi di unit-unit kerja BPKP.

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ARDAN ADIPERDANA

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



TRİYONO HARYANTO